

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam dunia teknologi informasi dimasa kini memiliki pengaruh atau efek yang besar bagi kehidupan manusia terutama untuk perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara. Peranan dari teknologi informasi ini dapat membantu sebuah perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi tersebut, dapat memungkinkan perusahaan untuk menyajikan, mengawasi serta dapat melaporkan keuangan dengan tepat dan tanpa masalah. Penggunaan teknologi informasi tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Dalam bidang akuntansi, teknologi informasi disebut sebagai sistem informasi akuntansi.

Perusahaan memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk menyajikan laporan-laporan keuangan dalam hal untuk memenuhi kepentingan informasi untuk para kreditor, investor, dan lain-lain. Menurut Mulyadi (2016, hlm.3) sistem informasi akuntansi ialah pengorganisasian, catatan, laporan-laporan, dan formulir yang disusun sehingga informasi keuangan yang tersedia yang diinginkan oleh pihak manajemen dapat mempermudah pengelolaan perusahaan. Sistem informasi akuntansi digunakan bagi semua jenis perusahaan yang bergerak di bidang apapun, baik untuk perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara. Sistem informasi akuntansi mengandung sebuah siklus dalam melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara tepat dan efektif. Siklus tersebut berkaitan dengan teknologi informasi demi memajukan bisnis dan usahanya. Sistem informasi akuntansi dapat mempermudah perusahaan melaksanakan sebagian besar aktivitas perusahaan. Dengan memberikan informasi yang tepat dan benar, biaya produktivitas dapat diminimalisir sehingga efektif dan efisien.

Sistem informasi akuntansi adalah bagian yang tidak kalah penting bagi manajemen. Maka dari itu, dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang efektif serta efisien bagi setiap perusahaan. Sistem informasi akuntansi sangat bermanfaat bagi para manajemen guna mendapatkan informasi yang tepat untuk pengambilan keputusan termasuk dalam hal penggajian. Sistem informasi penggajian merupakan sebuah, dokumen, pencatatan, fungsi, serta sistem pengendalian internal yang dipakai bagi kepentingan penyediaan informasi dan harga pokok untuk mengawasi pembiayaan tenaga kerja (Mulyadi, 2016, hlm.373). Penggajian sangat berpengaruh kepada tenaga kerja, karena jika tenaga kerja memperoleh gaji yang pantas maka tenaga kerja akan lebih produktif jika sesuai dengan kontribusinya terhadap perusahaan. Penggajian pada setiap perusahaan tentu memiliki metode yang berbeda-beda.

Gaji adalah sejumlah pembayaran atas jasa yang dibayarkan secara *periodic* untuk karyawan dan memiliki jaminan pasti. Dalam PSAK 24 terkait “Imbalan Kerja” sesuai dengan ‘Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) No. 13 Thn. 2003’ terkait ketentuan dalam pemberian imbalan pada perusahaan, baik imbalan istirahat panjang maupun imbalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari sisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji merupakan balas jasa dan penghargaan atas prestasi kinerjanya. Sistem penggajian digolongkan kedalam tiga sistem, yaitu sistem skala tunggal, skala ganda dan skala gabungan. Dasar hukum gaji PNS diatur dalam :

1. ‘Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Thn. 1974’ terkait “Pokok-pokok Kepegawaian” sebagai halnya telah diganti menjadi ‘Undang-undang Republik Indonesia No. 43 Thn. 1999’.
2. ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Thn. 1977’ mengenai “Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil” sebagai halnya telah diubah sebelas kali terakhir menjadi ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Thn. 2009’.

Pengendalian internal didefinisikan menjadi proses untuk mengawasi atau memantau yang memungkinkan manajemen untuk mengetahui apakah ada

ketidaksesuaian dengan yang ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan dari sistem pengendalian internal yaitu menjaga keamanan aset yang ada pada perusahaan, mengoreksi kebenaran dan ketelitian pada akuntansi, menjamin efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional serta mencegah adanya penyimpangan dari kebijakan yang ditetapkan.

“(Intishar & Muanas 2018) menyimpulkan bahwa pengendalian intern dapat dilaksanakan dengan baik apabila terdapat struktur organisasi yang jelas antara pemisahan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, pencatatan yang sistematis untuk setiap transaksi keuangan, pengawasan yang rutin dari atasan kepada bawahan, kebijakan dan prosedur pengamanan, menangkap serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan oleh karyawan untuk melaksanakan tugasnya, juga kegiatan evaluasi untuk menilai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Setiap perusahaan sebaiknya mempunyai sistem akuntansi penggajian yang baik, untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tanggung jawab dari masing-masing bagian”.

COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Tredway Commission*) mengeluarkan “*Internal Control Integrated Framework (ICIF)*” yang mendeskripsikan pengendalian internal ialah proses yang dilakukan manajemen, dewan direksi, dan entitas lain yang dibentuk guna memberi jaminan yang wajar terkait pencapaian tujuan mengenai pelaporan, kepatuhan, dan operasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang memiliki pertanggungjawaban langsung kepada Presiden. BPS Provinsi DKI Jakarta adalah penyedia data-data *statistic* baik untuk pemerintah maupun masyarakat umum. Dalam menjalankan aktivitasnya tentu saja terdapat peran dari tenaga kerjanya, maka diperlukan adanya efektivitas terkait sistem informasi akuntansi penggajiannya. Sistem informasi akuntansi di BPS Provinsi DKI Jakarta diatur dalam ‘pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Thn. 2004 mengenai “Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan” No.171/PMK.05 Tahun 2007’ yang telah diganti menjadi ‘233/PMK.05 Thn. 2007 mengenai “Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat”. Menteri yang menggunakan anggaran membuat dan memberikan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga (LKKL) mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan terhadap Menteri keuangan selaku pengelola fiskal, dengan tujuan untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKKP). Penyusunan laporan keuangan BPS Provinsi DKI Jakarta diatur pada ‘Peraturan Pemerintah No. 71 Thn. 2010’ mengenai “Standar Akuntansi Pemerintahan” serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di pemerintahan.

Sistem informasi akuntansi penggajian yang baik yaitu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang dibuat oleh perusahaan swasta ataupun perusahaan milik negara. Jika tidak sesuai maka sistem informasi akuntansi penggajian tersebut dapat dibidang kurang efektif terkait dengan pengendalian internalnya. BPS Provinsi DKI Jakarta sebagai perusahaan milik negara harus memiliki prosedur dan ketentuan dalam sistem penggajian yang dijalankan. Prosedur pembayaran gaji di BPS Provinsi DKI Jakarta mengharuskan pembayaran gaji dilakukan pada setiap tanggal 1 atau awal bulan, jika tidak dilakukan pada awal bulan maka dapat dikatakan adanya sistem penggajian yang tidak sesuai sehingga kurang efektif. Adapun adanya kesalahan lainnya dalam mengelola sistem informasi akuntansi penggajian seperti kesalahan pada mata akun, sehingga diharuskan mengajukan ralat terkait mata akun kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Terkait hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah pengelolaan gaji yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta yang diolah dengan sistem informasi akuntansi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan telah berjalan dengan baik ataupun belum baik.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis menetapkan judul penelitian :
“EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM PENGGAJIAN PADA
BADAN PUSAT STATISTIK PROPINSI DKI JAKARTA “.

1.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini difokuskan dalam peran dari sistem informasi akuntansi penggajian di Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Informan pada penelitian ini ditujukan kepada Bagian Tata Usaha khususnya Subbagian keuangan dan Subbagian Kepegawaian dan Hukum. Pengambilan data penelitian ini akan dilakukan di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Jalan Salemba Tengah No.36 RT.2/RW.4, Paseban, Senen, Jakarta Pusat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan yang menjadi pembahasan peneliti yaitu :

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pengendalian internal sistem informasi akuntansi pada Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang serta rumusan masalah, tujuan penelitian yang menjadi pembahasan peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengendalian internal sistem informasi akuntansi pada Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis:

Menambah pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi penggajian sesuai ketentuan prosedur yang memenuhi sistem informasi akuntansi secara baik serta efektif.

2. Aspek praktis

a. Bagi Akademisi

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk referensi bagi entitas yang akan melaksanakan penelitian dengan permasalahan yang serupa dan diharapkan agar bisa meningkatkan kepustakaan serta memberikan saran pada bidang sistem khususnya penggajian.

b. Bagi Perusahaan

Penulis mengharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan, sumber informasi serta dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam melaksanakan dan mengembangkan pengendalian internal penggajian.